

**STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN
YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA DITINJAU DARI FIQIH
SYISAH**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

**KHAIRUL RAMADHAN
NPM. 1421020185**

Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN
YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA DITINJAU DARI FIQIH
SYISAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

KHAIRUL RAMADHAN
NPM. 1421020185

Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : DRS.H. MUNDZIR HZ., M.AG.

Pembimbing II : Frengki, M.Si.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka, baik suku bangsa, bahasa kebudayaan dan adat istiadat begitu pula agama yang dianutnya. Awal terbentuknya Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengalami diskusi dan perdebatan yang panjang, artinya ada kelompok yang menerima secara terbuka dan ada kelompok yang menolak dengan alasan Pancasila terbentuk atas kesepakatan politik dimasa itu tanpa pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan spritualitas. Bahwa dalam setiap warga negara Inonesia berhak mempunyai kebebasan beragama sesuai dengan makna sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun, sebagian kecil dari masyarakat Indonesia masih ada yang mempercayai ideologi komunisme dan tak sedikit pula bagian masyarakatnya intoleran terhadap masyarakat beragama minoritas. Sedangkan dalam fiqih tidak ditetapkan secara pasti mengenai dasar-dasar negara atau ideologi bangsa, hal inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji persoalan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut fiqih siyasah.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimanakah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Dengan tujuan Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

Penelitian yang digunakan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, dan berbagai dokumen, seperti dengan mengumpulkan dan membaca referensi melalui internet dan data yang dapat mendukung penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah diskriptif- analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan khazamah fiqih para ulama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan negara Indonesia melarang masyarakatnya untuk paham terhadap ideologi komunisme, sebab agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya dan Allah adalah penguasa yang hakiki bagi alam semesta ini. Aturan-aturannya adalah yang tinggi dan abadi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Khairul Ramadhan
NPM : 1421020185
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TERHADAP NILAI KETUHANAN
YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA DITINJAU
DARI FIQIH SYISAH

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

DRS. H. Mundzir HZ., M.AG
NIP.195607271988031001

Pembimbing II

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017

Mengetahui
Ketua jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP.195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **STUDI ANALISIS TERHADAP NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA DITINJAU DARI FIQIH SYISAH** disusun oleh Khairul Ramadhan, NPM.1421020185, Program Study :
Siyasah Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

(.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

(.....)

Penguji II : Frenki, M.Si

(.....)

DEKAN

Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٦﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٧﴾

Artinya : “dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah”, “untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”.¹



¹ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, h.562.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahriabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta dan kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda Damin dan Ibunda Casumi yang senantiasa dan tiada henti hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku, membesarkanku dengan do'a dan jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Kakakku Muhammad Agus, Dewi Indrawati dan keluarga besar saya, yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga mengabulkan mimpi, cita-cita kita. Dan kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan bersama.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Khairul Ramadhan, lahir pada tanggal 05 Februari 1995 di Desa Kebun Sayur Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Anak ketiga dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Damin dan Ibu Casumi. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. MIN 01 Panjang (Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung) lulus tahun 2007
2. SMP Negeri 11 (Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung) lulus tahun 2010
3. SMK BLK, (Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) lulus tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi UKM-MAHARIPAL sebagai anggota muda.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Ditinjau Dari Fiqih Syisah”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Siyasah Syariah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;

3. Drs. H. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
5. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syariyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Drs.H. Mundzir HZ., M.AG selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Frengki, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Siyasah Syariyyah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung;
10. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu;
11. Sahabat-sahabatku, Darmawan , Ridho Pratama, Hendri Setiawan, Sirman Andika, Rizky Maulana yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya;
12. Motivator terbaik Sifa Fauziah;
13. Teman-teman Siyasah Syariyyah kelas A angkatan 2014, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini;

14. Kelurga The Zombie Ngompol, Cekrek , Bati, Baruk, Namar, Pero, Mahoni, Haji, Berumbung, Changi, Coc, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk lebih baik lagi.
15. Sahabat seperjuangan di masa-masa sulit hingga sekarang, Habibi, Ahmad Fajri, Aldino yang telah memberikan semangat dan dukungannya dari jauh;
16. Teman-teman KKN Kelompok 198 Tahun 2017 Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
17. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Mei 2018

Penulis

Khairul Ramadhan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II KONSEP KETUHANAN MENURUT FIQIH SIYASAH	
A. Pengertian Teokrasi	13
B. Prinsip-prinsip Teokrasi	14
C. Tokoh Pemikir Teori Teokrasi	21
D. Teokrasi Menurut Fiqh Siyasah	25
E. Implementasi Nilai Ketuhanan yang Maha Esa di Tinjau dari Fiqh Siyasah	40
BAB III NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA	
A. Sejarah Pancasila	43
B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.....	56
C. Inti Muatan Isi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	60
D. Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	69
BAB IV ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA	
A. Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila	76
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa	79
C. Pendapat Peneliti	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu di uraikan secara singkat istilah- istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA DITINJAU DALAM FIQIH SIYASAH”**. Adapun istilah- istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “penelitian ilmiah, kajian, telaahan”.² Sedangkan Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.”³ Jadi, Studi Analisis adalah penelitian ilmiah terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Sedangkan Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengartian dan keyakinan adanya tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.⁴

² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 207

³ *Ibid*, h. 58.

⁴ Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1991), Cet ke-10, h. 38

Pancasila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁵

Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Berdasarkan penjelasan pengertian istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya memahami dan meneliti tentang nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, kemudian ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya :

1. Alasan Objektif

Ketuhanan Yang Maha Esa telah diatur berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2, undang-undang ini mengatur kebebasan beragama, namun sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang menganut paham ideologi komunisme (tidak mempercayai adanya Tuhan)

⁵ *Ibid*, hal.1009.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), h.4.

sedangkan dalam Islam dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwasanya Allah lah yang patut disembah.

2. Alasan Subjektif

Bahasan ini sepanjang yang saya ketahui belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk skripsi dan penulis merasa mampu dikarenakan banyak sumber yang tersedia dan kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

C. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka, baik suku bangsa, bahasa kebudayaan dan adat istiadat begitu pula agama yang dianutnya. Walaupun demikian perbedaan-perbedaan itu bukanlah untuk dipertentangkan apalagi dibesar-besarkan melainkan mesti diarahkan dan diserasikan dengan cita-cita dan tujuan bersama karena itulah bangsa Indonesia telah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa ialah bahasa Indonesia, mempunyai satu negara dan pemerintahan yaitu negara dan pemerintah Republik Indonesia dan satu ideologi/falsafah negara ialah Pancasila⁷.

Awal terbentuknya Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengalami diskusi dan perdebatan yang panjang,⁸ artinya ada kelompok yang menerima secara terbuka dan ada kelompok yang menolak dengan alasan Pancasila terbentuk atas kesepakatan politik dimasa itu tanpa pertimbangan-

⁷ Abdul Azis Wahab, *Materi Pokok Pendidikan Pancasila I* (Jakarta:Universitas Terbuka,1996), Cet ke-5,h.20

⁸ *Ibid.*

pertimbangan keagamaan dan spritualitas. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberagaman agama dan budaya hidup dan beraktivitas dalam wilayah negara yang memiliki idiologi, asas, pandangan hidup yang dinamakan dengan Pancasila.

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan :

- a. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain: “ Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa”
- b. Pasal 29, UUD 1945 :
 - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁹

Tidak semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Salah satunya yakni PKI (Partai Komunis Indonesia) Perbedaan mendasar negara Pancasila dengan negara Komunis hanya kepada pencantuman "agama" yang dianut oleh para penguasa & penyelenggara negaranya. Negara berdasar Pancasila mencantumkan "agama" yang dianutnya, sedangkan di negara komunis sama sekali tidak ada pencantuman "agama" atau keyakinan yang dianutnya. Secara politik dan mempertahankan kekuasaan semuanya tak lebih dan tak kurang semuanya mirip. Negara penganut paham komunis memang memisahkan kekuasaan negara dengan agama. Karena negara-negara komunis tidak mengajarkan pengajaran agama atau keyakinan kepada setiap generasinya, maka jangan heran kalau dijumpai rakyat mereka dikenal sebagai penganut "atheis" alias tidak mengenal Tuhan sebagai pelindung dan penguasa dalam kehidupan pribadinya, semua yang melindungi dan menguasai kehidupan mereka adalah negara. Karena itu penting untuk memahami hakikat Tuhan dalam istilah al-Rububiyah. Dalam bahasa Arab, kata “Rabb”, memiliki tiga unsur makna yaitu: Yang Menciptakan, Yang Memiliki, dan Yang Mengatur. Maksudnya Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini.¹⁰

⁹ Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1991), Cet ke-10, h. 39

¹⁰ Firdaus, *Konsep al-Rububiyah (ketuhanan) dalam al-Qur'an*. Vol 3 Nomor 1, Tahun 2015, h.1.

Rabb jelas hanya satu, yaitu Allah. Berbeda dengan kata “*ilah*” yang artinya yang disembah atau sesembahan. Sesuatu yang disembah bisa siapa saja atau apa saja, bisa Rabb yang sebenarnya (Allah), bisa juga makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti manusia, batu, atau pohon, matahari, dan lain-lain. Kalimat *La ilaha illallah* dimaknai dalam bahasa Indonesia: “Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah.”¹¹

Allah adalah penguasa yang hakiki bagi alam semesta ini. Aturan-aturannya adalah yang tinggi dan abadi. Dalam al-Qur’an, alam tak lebih dari kerajaan yang dikendalikan penguasa tunggal, yaitu Allah SWT.¹² Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 26 :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".¹³

Setiap satu aturan yang diperkenalkan dalam Islam adalah aturan yang selayaknya dikatakan adil kerana ia dibuat tanpa didorong oleh kejahilan, hawa nafsu dan tidak datang dari pemikiran yang terbatas. Semua makhluk yang mendiami alam ini adalah milik mutlak Allah swt yang menguasai dan

¹¹*Ibid.*,

¹² Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam* (Jawa Barat : CV Pustaka Setia, 2010) , h.243

¹³ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an(Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h. 53.

memiliki alam ini. Menjadi satu kemestian untuk semua makhluk tunduk dan patuh kepada pencipta yang juga pemerintah alam, Allah swt. Semua makhluk bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai hamba Allah swt. Setiap aturan dan undang-undang yang terkandung dalam ajaran Islam adalah dating dari Allah swt dan tiadalah manusia berhak untuk mempertikaikannya

Pengakuan manusia terhadap eksistensi Tuhan telah melahirkan kesadaran bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah swt. Hal ini juga akan menjadikan manusia-manusia rabbani yaitu orang-orang. yang memiliki komitmen dalam pemeliharaan apa yang menjadi tanggung jawabnya, orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum agama, hikmah dan kebijaksanaan mengatur dan membina, serta berusaha mewujudkan kemaslahatan warganya.

Atas keyakinan yang demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi dan didalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain, di dalam negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (*ateisme*). Dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama

sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mempunyai kebebasan beragama sesuai dengan makna sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2.¹⁵ Dan dalam negara Indonesia pun tidak ada dan tidak diperbolehkan ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (*ateisme*). Sedangkan di Indonesia ini masih banyak sekali yang menganut paham komunis (tidak percaya adanya tuhan). Sedangkan dalam fiqih siyasah tidak ditetapkan secara pasti mengenai dasar-dasar negara atau ideologi bangsa, hal inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji persoalan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut fiqih siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqih siyasah terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila ?

¹⁴ Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, dkk, *Op.cit.* h. 39

¹⁵ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996) , h. 203.

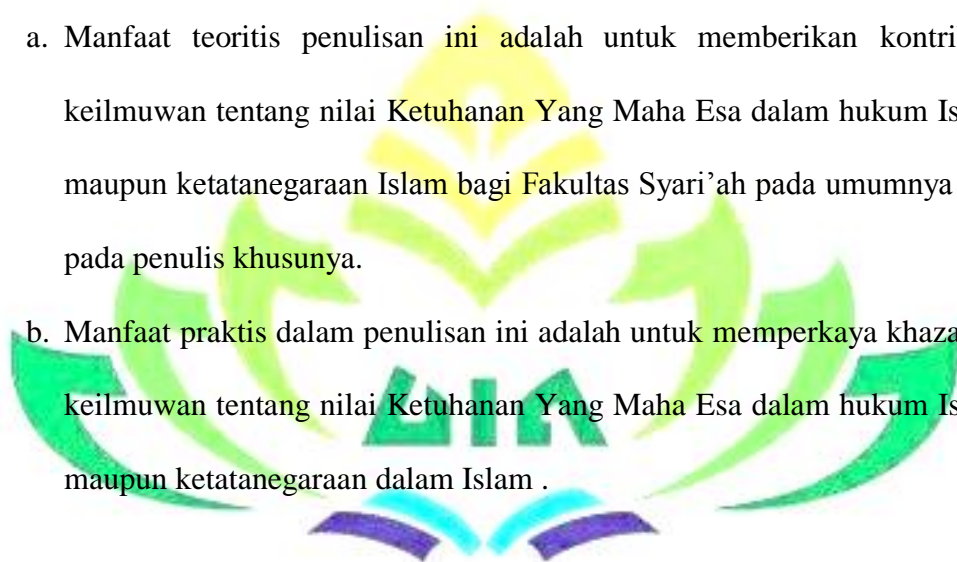
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum Islam maupun ketatanegaraan Islam bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya.
- b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum Islam maupun ketatanegaraan dalam Islam .



F. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁶ Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁷ Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasi dari buku-buku tentang Hukum Tata Negara.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum kemudian dianalisis berdasarkan dengan hukum ketatanegaraan Islam.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara

¹⁶ Kartini Kuntono, *Pengantar metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1989), h. 29.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 1985), h.

objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

c. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang buku-buku Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan buku Fiqh Siyasah.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan nilai Pancasila.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian¹⁸ dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku. Teknik ini dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data yang berupa bahan pustakan yang berkaitan dengan judul.

4. Teknik Pengelolaan Data.

Secara umum pengelolaan data setelah terkumpul dapat dikatakan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed) Cet 4 (Jakarta; Rineka Cipta, 1998), h.236.

tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penanandataan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang dieliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya pennyusunan suatu hasil penelitian atau data yang umum sifatnya.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

BAB II

KONSEP KETUHANAN MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Teokrasi

Istilah Teokrasi berasal dari istilah *theos* dan *cratein*. Secara harfiah, arti istilah *theos* adalah Tuhan. Akan tetapi, istilah *theos* yang dipergunakan disini adalah dalam pengertian yang luas karena bukan hanya mengandung arti Tuhan tetapi juga kekuatan gaib seperti dewa-dewa. Secara harfiah pengertian *cratein* adalah memerintah. Dengan demikian, istilah teokrasi mengandung arti sebagai pemerintahan oleh tuhan atau dasar kekuasaan Tuhan. Teori teokrasi bersifat metafisika karena penjelasan teori tersebut berlandaskan pada sesuatu substansi yang berada diluar dunia fisik yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia yaitu kekuasaan atau kekuatan ghaib dalam arti luas sebagaimana dikemukakan di atas.²⁰ Negara yang berdasarkan atas kedaulatan Tuhan, maka Tuhan lah yang menjadi kebijakan hukum tertinggi di negara tersebut.²¹

Ciri-ciri Negara teokrasi adalah :

1. Cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara.
2. Pemimpin yang berkuasa merupakan pilihan Tuhan
3. Hukum yang berlaku adalah hukum Allah
4. Pemerintahan dipegang oleh organisasi keagamaan.

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta:Erlangga,2014), h.56

²¹ “Kedudukan Hukum islam dalam Negara Republik Indonesia” (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/452> diakses tanggal (21 Desember 2018), pukul 13.20.

Dalam perkembangannya paham teokrasi terbagi dalam dua bagian, yaitu

:

1. Paham teokrasi langsung

Pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula.

Adanya negara didunia ini adalah atas khendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula.

2. Paham teokrasi tidak langsung

Yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan.

Kepala negara atau raja diyakini memerintah atas nama Tuhan²²

B. Prinsip Negara Teokrasi

Prinsip pokok dari teori teokrasi ini mengatakan bahwa asal mula negara dan sumber kekuasaan raja / penguasa dari dzat yang berasal dari Tuhan.

Namun keterbatasan waktu, maka hanya dibahas mengenai teokrasi Nasrani dan Islam.

1. Agama Nasrani (abad V – XV)

Semula agama ini dilarang, pengikutnya dibunuh dan merupakan agama terlarang. Namun kemudian berkembang pesat, bahkan menjadi agama Negara. Timbul persoalan siapakah wakil Tuhan didunia (raja / paus). Sebab pada waktu itu ada 2 organisasi yang berkuasa, yaitu

²²*Ibid*, h. 58.

kerajaan / negara dan gereja. Untuk menjawab permasalahan ini, ada 2 fase, yaitu:

a. Pra perang salib (abad V – XII). Terdapat pandangan bahwa segala sesuatu dapat terjadi karena kehendak Tuhan, sifatnya mutlak, sehingga Tuhan disebut sebagai *CAUSAPRIMA*. Konsekuensinya segala peraturan Negara identik dengan aturan agama. Pelanggaran terhadap hukum negara (state law) dipandang sebagai pelanggaran terhadap agama dan sebaliknya. Ciri khusus para pemikir kenegaraan pada waktu itu hanyalah digunakan untuk membela kepentingan dan eksistensi gereja. Sehingga keadaan ini disebut dengan masa kegelapan pada abad pertengahan. Tokoh yang mahsyur pada masa ini adalah Agustinus yang membedakan 2 jenis negara, yakni *civitas dei* (negara Tuhan) dan *civitas terrana* (negara iblis). Menurut beliau, negara yang paling baik dan sempurna adalah *civitas dei*, sedangkan *civitas terrana* bertugas memusnahkan musuh-musuh gereja demi kepentingan negara.

b. Pasca perang salib (XII-XV), konsepsi kenegaraan mendapat impresi dari ajaran Yunani Kuno. Segala sesuatu memang dari Tuhan, namun di sini Tuhan sebagai *CAUSAREMOTA* / SEBAB YANG JAUH. Adapun tokoh yang tenar adalah Thomas Aquinas. Di sini, beliau memberikan porsi yang seimbang antara gereja dan negara. Lebih lanjutnya, menurut beliau, gereja mengurus bidang kerohanian sedangkan dipimpin oleh paus, sedangkan negara

mengurusibidang keduniawian dengan dipimpin oleh raja. Konsepsi ini di pengaruhi ajaran Yunani Kuno, bahwa manusia adalahzoon politicon.

2. Agama Islam

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT diakui sebagai Tuhan sebagaimana Firman Allah SWT QS:Al-isra':110 berbunyi :

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تُجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

Artinya : Katakanah : “Serulah Allah atau Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-naa yang terbaik) dan janganlah kamu mengereaskan suaramu dalam shalatmu pula dan merendahkanya dan carilah jalan terngah diantara kedua itu.”²³

Segala sesuatu berasal dari Allah, namun tidak begitu saja ada didunia. Manusia diwajibkan untuk menyembah Allah SWT dan mengikuti Rasul Muhammad SAW.

Ciri pemerintahan Islam: bersifat teokrasi, karena segala permasalahan harus tunduk dan patuh pada perintah Allah melaluikitab Al-Quran dan Hadis Rasul.Kedaulatan Islam: konsep Islam menghendaki bahwa pemerintahan tidak dipegang oleh klaster tertentu dalam masyarakat, tetapi oleh seluruh rakyat muslim, baik tingkat atas maupun

²³ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an(Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.293.

bawah. Demokrasi ini juga disebut theokrasi terbatas, karena dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadits Rasul.

Tujuan negara Islam:

1. Negara harus mencegah terjadinya penghisapan manusia terhadap manusia lain.
2. Melindungi masyarakat, baik jiwa, keselamatan, kemerdekaan, jika terjadi penyerbuan bangsa lain.
3. Membasmi segala kejahatan.
4. Negara harus mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam beribadah.

Menurut sejarah teori ini paling tua. Teori kedaulatan Tuhan/Teokrasi mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah dimiliki Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai abad XV. Dalam perkembangannya teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan yaitu, gereja yang dikepalai oleh seorang Paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang Raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang Paus, karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan alat-alat perlengkapan organisasi negara.²⁴

²⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001), h. 70.

Pada permulaan perkembangan agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat. Oleh karena itu agama baru dianggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang dianut pada waktu itu, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa, atau pantheisme. Banyak para pemimpinnya yang dikejar kejar, ditangkap, dibuang, atau dibunuh, karena mereka dianggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan dari para penganut-penganutnya agama baru ini tidak musah, tetapi malahan akhirnya dapat berkembang dengan baik dan diakui sebagai satu-satunya agama resmi, agama negara.²⁵

Mulai saat itulah organisasi gereja mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan, tetapi sering juga bersifat keduniawian, maka tidaklah jarang kalau kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari negara dan peraturan dari gereja. Selama antara kedua peraturan tidak bertentangan, maka selama itu tidak ada kesukla-kesulitan para warga negara untuk mentaatinya. Tetapi apabila peraturan-peraturan saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal darimanakah yang berlaku, artinya kedua peraturan itu mana yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan itulah yang akan ditaati.²⁶

Teori ini beranggapan tindakan penguasa/negara itu selalu benar sebab didasarkan negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan negara ada secara langsung dan tidak langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, h. 71

langsung yaitu penguasa berkuasa menerima wahyu dari Tuhan, sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena kodrat Tuhan.²⁷

Paham yang menganggap kekuasaan negara itu berasal dari Tuhan dapat dilihat dari ungkapan Agustinus dalam bukunya “De Civitate Dei” menerangkan tentang dua macam negara, yaitu negara yang dipimpin langsung oleh Tuhan dan negara duniawi yang menurut pendapatnya adalah buatan setan.

Manusia itu sifatnya jasmaniah dan rohani. Karena itu maka kehidupan manusia itu rangkap dua pula. Kehidupan jasmaniah yang fana yang berkiblat pada diri sendiri, dan kehidupan rohani yang kekal, berkiblat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan jasmaniah yang fana mencari kepuasan duniawi untuk diri sendiri. Kehidupan rohani yang kekal mencari kepuasan hakiki yang kekal abadi.²⁸

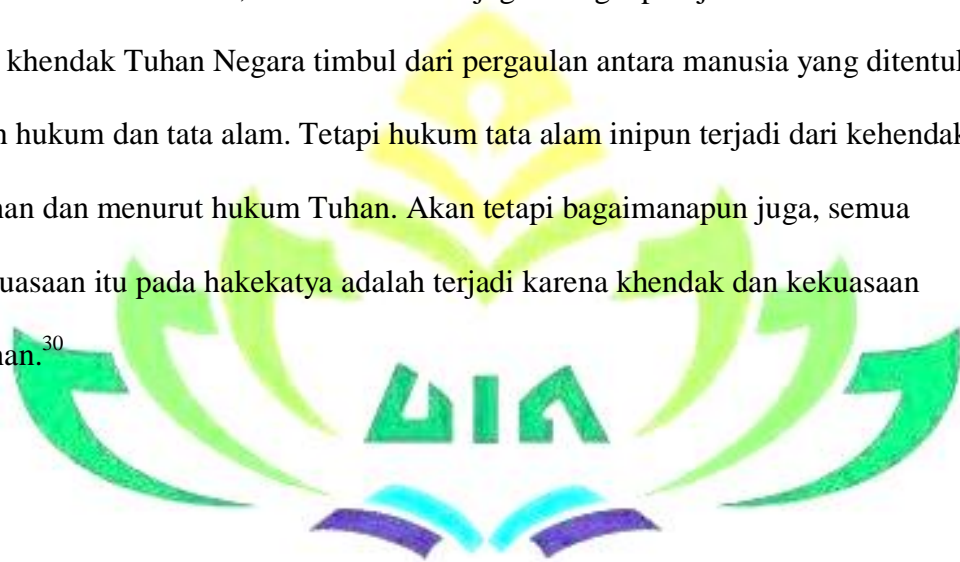
Dengan adanya dua macam kehidupan ini maka dari manusia telah terjadi dua macam masyarakat, dua negara yang berasal dari dua orang anak Adam, Kain dan Abel. Dari Kain yang durhaka terjadi masyarakat duniawi, negara duniawi (civitas terrena) yang menampung soal-soal duniawi yang tidak kekal. Dari Abel yang saleh telah terjadi masyarakat Tuhan, Negara Tuhan (civitas Dei) yang dipimpin oleh Tuhan sendiri dan menampung hal-hal kerokhanian yang kekal abadi.

²⁷*Ibid.* h. 30

²⁸*Ibid.*, h.31

Negara dunia disebut juga *civitas diaboli* (negara setan) karena menurut Agustinus negara ini adalah negara buatan setan.²⁹

Didunia sekarang ini kedua negara itu, negara duniawi dan negara Tuhan, masih campur dan baru pada hari penghabisan akan dipisahkan. Thomas Aquinas teori itu telah mendapat bentuk lain. Menurut pendapatnya negara itu bukan keburukan buatan setan, melainkan diakui juga sebagai perwujudan dari kekuasaan dan kehendak Tuhan. Negara timbul dari pergaulan antara manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Tetapi hukum tata alam inipun terjadi dari kehendak Tuhan dan menurut hukum Tuhan. Akan tetapi bagaimanapun juga, semua kekuasaan itu pada hakekatnya adalah terjadi karena kehendak dan kekuasaan Tuhan.³⁰



C. Tokoh Pemikir Teori Teokrasi

1. Nabi Muhammad SAW (570-632M)

Muhammad bin Abdullah adalah nabi, politisi, dan negarawan yang berhasil menjadikan hak-hak masyarakat Arab yang jahiliyah itu berputar haluan menjadi manusia yang berkeadaban.³¹ Muhammad dengan ajaran Islam yang penuh perdamaian, meletakkan posisi manusia sebagaimana mestinya di depan hukum, luhur, bermartabat serta sederajat kedudukannya antara yang satu dengan yang lainnya tanpa ada diskriminasi. Risalah Muhammad dengan dimensi yang multi fungsi dapat menyesuaikan kondisi zaman yang terus mengalami perubahan dengan aturan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h. 32

³¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & UUD NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Pada tahun 9 H dan 10 H (630-632 M) banyak suku dari pelbagai pelosok mengirim delegasi kepada Muhammad bahwa mereka ingin bergabung dan patuh kepada aturan yang digagas Muhammad. Serta dengan sadar atau tanpa paksaan menganut agama Islam. Singkatnya, dalam menunaikan ibadah haji yang terakhir, yakni Haji *Wada* tahun 10 H Nabi menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah antara lain tentang persamaan hak di depan hukum tanpa adanya perbedaan ras, etnis, atau bersikap diskriminasi, hukum berlaku pada semua rakyat tanpa membedakan pejabat atau warga negara biasa, mengutuk tindakan kekerasan dan lain sebagainya.

Di antara perubahan yang berhasil dibawa oleh Muhammad ialah: *pertama*, dari segi agama, bangsa Arab yang semula penganut animisme dinamisme dan peganisme menjadi menganut agama Islam yang menegaskan tauhid. *Kedua*, dari segi kemasyarakatan yang semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenal perikemanusiaan, seperti saling membunuh, tidak menghargai martabat wanita, berubah menjadi bangsa yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak lagi terlihat eksploitasi dan diskriminasi terhadap wanita, serta perbedaan status sosial, penghapusan perbudakan. *Ketiga*, dari segi politik, masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang fanatik terhadap kesukuannya.³²

Kenyataan ini dapat dikaji dengan fakta sejarah, bahwa Muhammad telah berhasil menanam embrio negara hukum, meletakkan persamaan derajat manusia ketempat yang semestinya. Perlakuan tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa kekinian adalah pengakuan sepenuhnya terhadap nilai hak asasi manusia (HAM). Karena hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang secara alamiah telah dimiliki dan melekat pada manusia sejak keberadaanya.

2. Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, dilahirkan di Lombardy, Rossa Sicca daerah kerajaan Napels, Italia pada tahun 1225 M. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan pangeran landulf, keturunan Aquino dan Theodora,

³² *Ibid* .,h 18

seorang countest of Teano. Keluarganya merupakan penganut agama Khatolik yang taat. Latar belakang ini ikut menentukan latar belakang pendidikan dan tujuan hidupnya.³³

Tulisan-tulisan St. Thomas Aquinas dan madrasahny mengandung pikiran-pikiran politik paling penting yang muncul pada fase ini, khususnya pada abad ke-13 M. Thomas menggabungkan antara akal dan hati, yakni antara filsafat dan agama. Ia menggabungkan pendapat-pendapat rasional Aristoteles dengan ajaran-ajaran Kristen yang spiritualistik. Ia berpendapat bahwa Allah itu ada. Sesungguhnya agama menyuruh kita kepada keimanan karena Allah cukup jelas memperlihatkan Dzat-Nya. Dia adalah sumber kebahagiaan, wujud yang paling agung, dan Dzat yang benar.³⁴

Dengan demikian Allah adalah sumber yang Esa dan Pertam. Dia yang menciptakan manusia. Dia pulalah yang menciptakan perkumpulan manusia. Thomas menegaskan pentingnya pemilihan penguasa sehingga akan terbentuklah monarki yang terpilih. Pemimpin paling baik yang menempati posisi aristokrasi harus didukung oleh segenap rakyat. Itulah peraturan Allah yang digariskan Musa dan para penggantinya. Mereka memimpin dengan bantuan 72 orang bijaksana yang dipilih kaumnya sebagaimana tuhan sendiri memilih kerajaan untuk-Nya.

Menurut Thomas, tugas negara secara garis besar ada empat. Diluar itu adalah urusan gereja. Tugas negara yang pertama adalah mewujudkan

³³ Iwan Satriawan, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Raja Wali Pers, 2016) h.23

³⁴ Ibid.,

keamanan dan ketentraman dalam kehidupan serta membebaskan setiap orang dari kelaparan dan bahaya. Tugas kedua adalah mewujudkan keteraturan dan menjamin keadilan dengan perantaraan ketetapan hukum. Tugas ketiga adalah mewujudkan batas minimal etika dengan bantuan gereja. Tugas keempat adalah melindungi agama. Perlindungan pemerintah terhadap agama diwujudkan dalam bentuk menjaga dan membantu gereja. Tugas negara yang terakhir ini menegaskan bahwa negara terikat secara kuat dengan tujuan yang abadi, tujuannya adalah setiap rakyat memiliki harapan abadi dibawah bimbingan gereja.

Pemerintahan adalah amanat yang diemban oleh pundak semua anggota masyarakat selama dipilih berdasarkan asas kebebasan.

Kekuasaan kepala negara berasal dari Allah dengan tujuan mengatur kehidupan yang bahagia untuk manusia. Namun, kekuasaan ini tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum.

Menurut Thomas Aquinas, hukum terbagi pada empat macam, yaitu hukum abadi (*eternal law*), hukum alam (*natural law*), hukum positif (*human law*), dan hukum tuhan (*devine law*). Hukum yang pertama sesuai dengan peraturan tuhan terhadap alam atau hukum yang dengannya, Allah mengendalikan alam. Hukum abadi adalah hikmah Tuhan yang diatur untuk manusia. Oleh karena itu, hukum ini berada diatas tabiat manusia dan pemahamannya. Dengan demikian, sudah tidak

asing lagi untuk dipahami manusia, atau tidak mungkin bertentangan dengan kekuatan rasional.³⁵

Hukum alam adalah refleksi kata-kata Tuhan untuk makhluk. Hukum ini tampak dalam kecintaan manusia secara naluri untuk mengerjakan kebaikan. Maknanya, hukum alam adalah yang membimbing akal dan jiwa utama yang merupakan refleksi dari hukum abadi.

Hukum tuhan terdapat dalam ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang datang melalui jalan wahyu atau misionaris, seperti ajaran khusus yang diturunkan oleh Allah kepada Yahudi dalam dua papan yang terjaga, dan juga seperti ajaran-ajaran Masehi yang datang melalui jalan kitab suci atau gereja. Hukum tuhan adalah dasar tiga hukum selainnya.

Hukum abadi dan hukum azali merupakan tujuan akhir dari teologi orang Kristen. Hukum azali adalah perencanaan alam dengan mempertimbangkan tujuan agung yang dibuat oleh Allah yang telah menciptakannya. Hukum Illahi adalah keinginan Allah yang tampak pada dua masa, dahulu dan sekarang.

Thomas berpendapat bahwa mentaati hukum merupakan kewajiban selama hukum itu bersifat adil. Adapun hukum yang lalim jika bertentangan dengan hukum alam, hukum Illahi, dan hukum abadi, tidak boleh untuk ditaati apapun keadannya. Namun, apabila pertentangannya

³⁵ *Ibid.*

itu bersifat persial dan sekunder, maka positif tetap harus ditaati dan apabila melanggarnya sangat membahayakan terhadap masyarakat.

D. Teokrasi Menurut Fiqh Siyasah

Teori ketuhanan atau teori teokrasi pada awalnya banyak dianut oleh sebagian besar ilmuwan politik pada abad ke- 18M, dengan tokohnya Thomas Aquinas (1225-1274). Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyatnya harus mematuhi apa yang telah diputuskan pemimpinnya karena pemimpin atau raja dianggap sebagai kepanjangan Tuhan. Teori negara Tuhan (Teori Teokrasi) pertama kali dikerjakan oleh gereja-gereja di Dataran Eropa. Sedangkan dalam perjalanan sejarahnya teori negara tuhan juga dianut oleh bangsa Jepang dimana mereka menganggap kaisar sebagai anak Tuha (dewa matahari).³⁶

Pada awal-awal munculnya Islam hingga penaklukan Makkah, sering kali Nabi Muhammad Saw dalam memutuskan sesuatu masalah yang menyangkut masyarakat pada umumnya menunggu turunnya wahyu lewat Malaikat Jibril. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai ciri-ciri Negara Tuhan. Karena kebijakan yang diambil oleh pemimpin menunggu perintah dari Tuhan-Nya. Sehingga pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW berakhir pula penyampaian wahyu dan memunculkan ijtihad-ijtihad dari Khukafatur Rosyiddin dan

³⁶Iwan Satriawan, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Raja Wali Pers, 2016) h. 42

sahabat-sahabat dalam memutuskan masalah-masalah umat yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi SAW.³⁷

Hal ini berakibat munculnya banyak aliran yang tumbuh dan berkembang dalam Islam. Kemunculan aliran-aliran ini ada beberapa sebab pertama adanya perbedaan pandangan dari para sahabat nabi dalam menyelesaikan suatu masalah yang mana masalah tersebut belum muncul sewaktu nabi hidup. Kedua adalah adanya fitnah kubro (fitnah besar) yang muncul pasca terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan r.a yang berlanjut dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini yang kemudian memunculkan dua golongan besar yaitu golongan qadariyah dan golongan jabariyah.³⁸

Allah adalah penguasa yang hakiki bagi alam semesta ini. Aturan-aturannya adalah yang tinggi dan abadi. dalam Al-Qur'an, alam tak lebih dari kerajaan yang dikendalikan penguasa tunggal, yaitu Allah SWT. Banyak ayat yang mendukung hal ini :

QS: Al-Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ تُوْتِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di

³⁷Ibid.

³⁸Ibid., h. 43

*tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*³⁹

Selama Allah adalah satu-satunya yang memiliki kerajaan yang memerintah, yang melarang, yang memberi, yang memuliakan, dan yang menghinakan. Dia adalah penguasa yang hakiki dan kekal bagi seluruh alam. Dialah yang memiliki seluruhnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 189 :

Q.S Al- Imran : 189

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Artinya : *kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.*⁴⁰

QS : Al-Mulk ayat 1

تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

Artinya : *Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁴¹

Dengan demikian, Allah adalah penguasa tunggal. Hukum ketuhanan-Nya adalah sumber segala bentuk undang-undang dan hukum. Harum Khan Sherwani mengatakan bahwa karena kapasitasnya sebagai penguasa alam semesta, Allah adalah satu-satunya pemilik kekuasaan legislatif yang karenanya kekuasaannya itu menjadi sumber segala produk hukum, baik itu hukum positif atau hukum alam.⁴² Karena Allah melalui hukum-Nya yang abadi selamanya bertujuan mewujudkan keadilan, keadilan ini mesti selalu menjadi tujuan pula bagi setiap produk hukum dengan bersandar pada hukum-Nya.

³⁹Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h. 53

⁴⁰Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.75.

⁴¹Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.562.

⁴²Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), h. 247.

Dengan demikian sekali lagi Allah adalah penguasa tunggal bagi seluruh alam semesta. Hukum-Nya bersifat luhur dan abadi. Sementara itu, manusia hanyalah khalifah-Nya di bumi. Allah SWT berfirman dalam QS: An-Naml: 62 :

أَمَّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : atau siapakah yang memperkenalkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).⁴³

Dengan demikian, Allah adalah yang memilih raja atau penguasa lalu menguasainya untuk meujudka keadilan sesuai dengan hukum-Nya. Dia telah memilih Nab Muhammad SAW untuk menjdi Nabi sekaligus pemimpin negra Islam.

Sebagaimana telah kami jelaskan, negara Islam berdiri pada masa Rasulullah. Ia menangai urusan-urusan penting, Ia pun menangai urusan-urusan pengadilan, militer, dan administrasi. Itu adalah otoritas atau mandat yag diberika Tuhn kepadanya. Bayak ayat yang menjelaskan bahwa Allah memilih Muhammad sebagai Nabi-Nya untuk menjadi pemberi solusi dan pemimpin bagi manusia.⁴⁴ Allah SWT berfirman dalam QS: An-Nisa : 105 :

⁴³ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.382

⁴⁴ *Ibid.*

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٥٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*⁴⁵

Makna ayat diatas adalah bahwa sesungguhnya Allah telah memiliki Muhammad dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya sebagai penjelas tentang cara menyelesaikan persoalan dengan apa yang telah ditetapkan, baik berupa perintah maupun larangan. Dengan demikian, Nabi tidak menyelesaikan persoalan berdasarkan pemikiran atau ketetapan sendiri, tetapi berdasarkan ketetapan hukum Tuhan.⁴⁶

Konsep politik Al-Qur'an berikutnya yang paling mendasar dan paling revolusioner adalah kedaulatan Tuhan atas seluruh kehidupan manusia. Sepanjang berkaitan dengan konsep kedaulatan Tuhan atas alam semesta, hampir semua orang mengakui bahwa konsep ini benar. Tetap yang dituntut oleh Al-Qur'an adalah bahwa mereka juga harus mengaku dia sebagai

⁴⁵ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.95.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 248

Berdaulat atas kehidupan moral, sosial, budaya, ekonomi, dan politik manusia.⁴⁷

Para pengkaji sains politik tentunya sangat mengetahui betapa telah begitu peliknya masalah kedaulatan dizaman sekarang ini. Masalah ini mungkin menjadi masalah yang paling banyak mengundang perdebatan dibandingkan dengan masalah-masalah lain dalam lingkungan sains politik; dan cukup banyak pemikir yang bahkan telah mengakui bahwa masalah ini begitu membingungkan sehingga akan lebih baik jika para teoritis politik membuangnya sama sekali. Disini tidak hanya terdapat keganjilan teoritis maupun logis, tapi fakta mengenai berkembangnya paham nasionalisme tampaknya semakin menjadikan konsep kedaulatan bangsa sebagai konsep yang usang. Akar penyebab semua kesulitan yang terjadi dalam masalah ini adalah adanya kekeliruan mendasar : *para filosof politik telah mencoba untuk memakaikan toga kedaulatan kepada manusi, suatu periada yang sebenarnya tidak menginginkanya dan oleh karenanya tidak cocok baginya.*⁴⁸

Konsep kedaulatan berdasarkan Al-Qur'an cukup sederhana. Tuhan adalah pencipta Alam semesta. Dia adalah Pemelihara dan Penguasa sejati. Khendak-Nyalah yang dominan, karena semua makhluk adalah milik-Nya dan Perintah-Nya juga harus ditegakkan dan ditaati dalam masyarakat manusia. Dia adalah Kedaulatan sejati dan Khendak-Nya harus berkedudukan sebagai Undang-undang.

⁴⁷ Adul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan, 1993), h,188

⁴⁸ *Ibid.*, h. 189

Al-Qur'an membasmi landasan dasar syirik (politiesme), ateisme dan pendewaan diri, jika seseorang tidak menganggap Allah sebagai *Khaliq* dan Pemerintah, serta berpendapat bahwa kini tidak memiliki firman praktis atas penyelenggarannya, maka atas semua kewenangan oleh manusia bagi dirinya sendiri atau penyukutuan dan pengakuan kekuasaan-kekuasaan lain seperti berhala yang kemungkinan telah dikutuk oleh al-Qur'an.⁴⁹

Al-Qur'an berulang-ulang menggunakan istilah-istilah politik seperti Kerajaan, Raja, dan Kedaulatan atas alam semesta hanya bagi-Nya. Segenap alam semesta merupakan satu sistem organik yang dikendalikan oleh satu Kewenangan. Jadi barangsiapa selain Dia yang menggugat sebagian atau seluruh kedaulatan ini, baik bagi dirinya sendiri maupun kelompok atau organisasi, dan hanya bermimpi atau berkhayal. Satu-satunya cara yang wajar bagi manusia adalah mengakui Pencipta dan Majikan ini sebagai Tuhan dan obyek sesembahan dalam arti religius dan sebagai satu-satunya kedaulatan, penguasa dan Raja dalam pengertian sosial maupun politis.⁵⁰

Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS: Al-Imran : 26 yaitu :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

⁴⁹ *Ibid.*, h. 192

⁵⁰ *Ibid.*, h. 193

Artinya : Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁵¹

Masalah ini dijelaskan lebih jauh dengan pernyataan *lahu al khalq wal al-amr* (sesungguhnya kepunyaan-Nyalah semua makhluk dan semua perintah). Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya Pencipta, melainkan juga Pemerintah dan Penguasa. Dia tidaklah melepaskan makhluk-Nya ke tangan pihak lain untuk diperintah sekehendak mereka sendiri, tidak juga menganugerahkan kemerdekaan dan otonomi kepada sebagian makhluk-Nya untuk melakukan sesuatu sekehendak hati mereka sendiri. Tuhan adalah Penguasa yang sebenarnya dan melaksanakan kekuasaan-Nya yang nyata atas kerajaan-Nya. Malam dan siang tidak saling menutup satu sama lain dengan sendirinya tanpa suatu mekanisme Ilahiah dan musim tidaklah berubah secara kebetulan. Tetapi Khendak Tuhanlah yang mengatur semuanya itu; Dia dapat melaksanakan perombakan kearah yang Dia khendaki. Segala sesuatu tunduk kepada Kehendak-Nya, dan secara tersirat akan mentaati-Nya. Semuanya bertindak sesuai dengan apa yang dikhendaki

⁵¹ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h.53.

Tuhan. Adalah wajar bahwa sebagai Pencipta, maka Khendak-Nya dan hukum merupakan Khendak dan Hukum Yang Tertinggi.⁵²

Tujuan perintah-perintah Al-Qura'an yang berkaitan dengan ini adalah bahwa manusia harus mewujudkan status sejatinya sebagai khalifah dengan demikian dia bertugas untuk mentaati Majikannya, mengikuti instruksi-instruksinya dan menegakkan Khendak-Nya di bumi. Jika manusia melakukan yang sebaliknya maka dia akan menjadi hamba setan, musuh abadi manusia dan akan tersesat.

Kekhalifaan ini merupakan kekhalifahan umum. Pada dasarnya ia milik umat manusia dan bukan merupakan hak istimewa karena ia menyiratkan arti pengakuan Tuhan sebagai pemegang Kedaulatan, maka hanya orang-orang yang mengakui hal inilah yang memiliki hak untuk menggunakannya. Inilah sebabnya mengapa dalam suatu Negara Islam kekhalifahan terbatas hanya untuk kaum muslim, tetapi dapat dinikmati oleh semuanya dan tidak dibatasi oleh klan, kelompok atau dinasti manapun.⁵³ Sebagaimana yang telah kita katakan dahulu, dari konsep Kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia, timbul implikasi bahwa manusia harus mengikuti hukum yang telah diturunkan Tuhan.

Legislasi semacam ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai mengadaadakan kebohongan tentang Tuhan. Dikatakan demikian karena hal ini hanya dapat terjadi jika orang melakukan salah satu dari dua hal berikut : orang ini

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*, h. 196

mencanangkan sesuatu sebagai halal atau haram tanpa menunjukkan dasar atau landasan kitab Tuhan, meskipun dalam kenyataannya telah diharamkan atau dihalalkan oleh Tuhan sendiri, atau Tuhan sendiri telah memberikan wewenang-Nya dalam kaitan ini dan mereka ternyata melakukan legilasi sekehendak hatinya. Yang mana yang dilakukannya, semuanya merupakan tindakan mengada-adakan kebohongan mengenai Tuhan.⁵⁴

Disini tuhan memperingatkan orang-orang yang tidak. Mengatur urusan mereka selaras dengan hukum yang telah diturunkan-Nya dan tidak menegakkannya sehingga mereka ini dicap sebagai :

1. Tidak beriman
2. Tidak adil
3. Pengkhianat.

Ini berarti bahwa orang yang tidak menaati hukum Tuhan terbukti melakukan tindak pidana *kufur*, zalim dan fasik. Pertama ketidaktaatan ini berarti bahwa dia melampaui wewenang Allah dan menolak untuk menerima perintah-Nya (*kufur*). Kedua, ini berarti tindakan ketidakadilan, karena Perintah Tuhan adalah keadilan, penyimpangan dari hal ini merupakan tirani dan ketidakadilan (zalim). Terakhir, manusia adalah subyek Tuhan dengan tidak menaati Perintah Tuhan ini, dia melanggar batas-batas kesetiaan dan ketaatan kepada-Nya, dan tindakan ini merupakan tindakan melanggar batas (fasik).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, h. 197

⁵⁵ *Ibid.*, h. 198

Inilah sebabnya mengapa didalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan *de jure* juga milik Allah yang kedaulatan *de facto*-Nya melekat dan terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam yang secara khusus menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk. Berulang kali Al-Qur'an memberikan penekanan yang semakin meningkat. Pada suatu ayat, Al-Qur'an menyatakan :

QS : Yusuf ayat 40

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : *Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*⁵⁶

Perintah-perintah ini dengan jelas menunjukkan bahwa pengakuan dan pembenaran atas kedaulatan *de jure* dari Tuhan adalah Islam dan penolakannya disebut *kufur*.⁵⁷

⁵⁶ Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an (Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro), h. 240

⁵⁷ *Ibid.*, h. 240

Hampir semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Meskipun diakui bahwa mereka mempercayai adanya banyak Tuhan. Karena itu penting untuk memahami hakikat Tuhan dalam istilah al-Rububiyah. Dalam bahasa Arab, kata “Rabb”, memiliki tiga unsur makna yaitu: Yang Menciptakan, Yang Memiliki, dan Yang Mengatur. Maksudnya Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini.⁵⁸

Rabbaniyyah membawa maksud ketuhanan. Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan adalah datang dari Allah swt. Islam itu sangat sempurna dan kesempurnaan itu merupakan bukti ajaran ini adalah datang dari Tuhan dan tiada sebarang campur tangan makhluk dalam pembuatannya.⁵⁹

Islam diturunkan kepada umat manusia sebagai pembimbing dalam menuju kehidupan yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Akal fikiran manusia tidak mampu menciptakan sebuah sistem yang sempurna seperti ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan melalui perantaraan Jibril a.s dicipta dengan lengkap untuk diamalkan oleh umat manusia keranahanya Allah swt yang maha mengetahui hakikat kejadian manusia. Maka dengan itu, hanya Allah swt yang selayaknya mencipta ajaran Islam. Segala aturan dan sistem

⁵⁸ Firdaus, *Konsep al-Rububiyah (ketuhanan) dalam al-Qur'an*. Vol 3 Nomor 1, Tahun 2015, h.1.

⁵⁹ *Ibid.*

yang diamalkan dalam ajaran islam adalah lengkap dan sesuai untuk diamalkan oleh semua umat manusia.⁶⁰

Setiap satu aturan yang diperkenalkan dalam Islam adalah aturan yang selayaknya dikatakan adil kerana ia dibuat tanpa didorong oleh kejahilan, hawa nafsu dan tidak datang dari pemikiran yang terbatas. Semua makhluk yang mendiami alam ini adalah milik mutlak Allah swt yang menguasai dan memiliki alam ini. Menjadi satu kemestian untuk semua makhluk tunduk dan patuh kepada pencipta yang juga pemerintah alam, Allah swt. Semua makhluk bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai hamba Allah swt. Setiap aturan dan undang-undang yang terkandung dalam ajaran Islam adalah datang dari Allah swt dan tiadalah manusia berhak untuk mempertikaikannya.

Rabb adalah perkataan arab yang dinisbahkan kepada Allah. Perkataan manusia rabbani, contohnya, membawa maksud, manusia yang berpengetahuan tentang Allah, berpegang teguh dan beramal dengan ajaran Allah.⁶¹

Sebagaimana Firman Allah QS : Al-Imran : 79

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

⁶⁰ <http://megasholihah33.blogspot.com/2015/07/rabbaniyyah-sumuliyyah-al-wudhuh-al.html> Diakses tanggal 17 September 2018 Pukul 13.28

⁶¹ *Ibid.*

Artinya : Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya *al-khasoish al-ammah lil islam* menyatakan bahwa yang di maksudkan dengan rabbaniyah itu adalah meliputi empat aspek :

1. *Rabbaniyah al-ghoyyah* (matlamat/tujuan)

Rabbaniyah al-ghoyah atau dari segi tujuan menggambarkan betapa setiap matlamat atau tujuan suatu usaha amal, cita-cita, sasaran, perjuangan, pengorbanan dan hal tujuan kehidupan manusia haruslah dalam acuan dan kerangka menuju dan mencapai keridhaan Allah.

2. *Rabbaniyah al-wijhah* (persepsi)

Rabbaniyah al-wijhah (persepsi) membawa maksud : suatu persepsi, tan ggap dan worldview adalah di lihat melalui kerangka kacamata atau acuan yang di pandukan oleh Allah. Sebagai contohnya bagaimana Allah menyebut dalam al-quran bagaimana persepsi dan worldview rabbaniyah berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat.

3. *Rabbaniyah al-mashdar* (sumber)

Rabbaniyah al-mashdar bermaksud : segala sumber dan akar umbi kepada kehidupan di seluruh alam ini adalah berpuncak dari acuan Allah dan

mengembalikan sumber yang menjadi rujukan serta sandaran peraturan kehidupan manusia seluruhnya kepada ketetapan allah.

4. *Rabbaniyah al-manhaj* (sistem)

Rabbaniyah al-manhaj bermaksud setiap system, peraturan, kaedah dan undang-undang untuk menyempurnakan kehidupan insaniah manusia adalah berteras dan berasaskan kepada acuan allah.⁶²

E. Implementasi Nilai Ketuhana Yang Maha Esa di Tinjau dari Fiqih Siyasah

Dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Fiqih Siyasah adalah :

1. Persaudaraan

dalam tern Islam, persaudaraan dikenal dengan kata *Ukhuwwah* yang terdiri dari tiga macam yaitu: pertama, *Ukhuwwah Basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Kedua, *Ukhuwwah Islamiyah* (Persaudaraan sesama muslim). Ketiga, *Ukhuwwah Wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan).

2. Persamaan

Memang dalam prespektif sejarah, nabi Muhammad telah membawa perubahan yang demikian besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam persoalan stratifikasi sosial. Masyarakat tidak dibedakan berdasarkan status dan kelas sosial, akan tetapi dianggap sama sebagai warga masyarakat.

⁶² Firdaus, *Konsep al-Rububiyah (ketuhanan) dalam al-Qur'an*. Vol 3 Nomor 1, Tahun 2015, h.20.

3. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud disini adalah, setiap umat bebas melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan dan haknya, dengan syarat tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain.

4. Toleransi

Dalam Islam, toleransi sangat dijunjung tinggi meskipun kita senantiasa dianjurkan untuk mengajak sesama pada kebenaran dan kebaikan akan tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan.

5. Pri-Keadilan

Dapat diartikan sebagai menempatkan suatu pada tempatnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian tidak akan ada penetapan hukum yang mempertimbangkan status dan kelas sosial salah satu umat, semua warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

Dengan adanya sila ketuhanan Yang aha Esa, menyatakan bahwasannya Indonesia percaya dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya warga Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaanya masing-masing. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk

agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat menjaga kerukunan antar semua umat beragama.

Dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara memaksa agama atas suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, sehingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu. Pancasila dan UUD 1945 menjamin setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mempunyai kebebasan beragama sesuai dengan makna sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2.⁶³

⁶³ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996) , h. 203.

BAB III

NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA

A. Sejarah Pancasila

1. Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pendirian suatu negara membutuhkan landasan-landasan dasar.

Landasan-landasan dasar tersebut merupakan pondasi. Landasan dasar atau pondasi tersebut dikenal sebagai dasar negara.

Dasar-dasar yang menjadi landasan berdirinya suatu negara biasanya digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar-dasar negara antar negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh, dasar negara Republik Rakyat Cina (RRC) adalah San Mincu I, sementara itu dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar-dasar negara tersebut dirumuskan dari jiwa (rakyat) bangsa atau negara masing-masing.⁶⁴

a. Terbentuknya BPUPKI

Gedung Pancasila adalah tempat dimana dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dirumuskan. Waktu itu wilayah Indonesia berada dibawah pendudukan tentara Dai Nippon atau Jepang. Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan ke

⁶⁴ Wahyu Widodo, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta:Cv.Andi Offset,2015), h.59

seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat.

Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus terdesak oleh tentara Sekutu. Tentara sekutu sudah menyerang beberapa wilayah pendudukan Jepang seperti Papua Nugini, kepulauan Marshal, Salomon, Ambon , Manado, Makasar, juga Surabaya. Karena itu, maka tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikikan Kumakichi Herada (Panglima tertinggi bala tentara Dai Nippon di Indonesia) mengumumkan pembentukan *Dokuritus Junbi Cosakai* atau lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang, termasuk 7 orang dari Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Bertindak sebagai ketua adalah K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dibantu dua ketua muda. Masing-masing ketua muda tersbut adalah Ketua Muda I (orang Jepang) dan Ketua Muda II R.Pandji Suroso.⁶⁵

b. Sidang BPUPKI dan Usulan-usulan Rumusan Pancasila

Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelediki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945.

Sejak dilantiknya pada tanggal 28 Mei 1945 hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengadakan dua kali masa sidang :

⁶⁵ *Ibid.*, h. 60

- 1) Sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945; ini adalah tahap perancangan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945; ini adalah tahap perumusan Pancasila dan UUD 1945.⁶⁶

Sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945; tahap perancangan Pancasila dan UUD 1945. Prof. MR. Mohammad Yamin pada tanggal 29 meidibukalah sidang pertama oleh ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sidang dimaksudkan untuk mencari dan merancang calon Dasar Negara yang akan merdeka. Dan dalam sidang ini yang pertama mengajukan pidato prasarannya ialah Mr. M. Yamin. Adapun judul prasarannya itu adalah : “Asas dan dasar Negara Kebangsaan Indonesia”. Dalam prasaran atau usul tersebut Mr. M. Yamin mengajukan lima asas dan dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat⁶⁷

⁶⁶ Miftahuddin Zuhri, *Pancasila* (Yogyakarta:Liberty,1985),. h.17

⁶⁷ *Ibid.*, h. 18

Ir. Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang Badan Penyelidik mengajukan pidatonya, yakni:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah usul Ir. Soekarno dimuka sidang BPUPKI.

Menurutnya atas petunjuk seorang teman ahli bahasa namanya Panca-Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia kekal dan abadi”. Meskipun begitu Ir. Soekarno masih menawarkan kepada sidang untuk memilih bilangan asas atau dasar negara itu : “Atau barangkali ada saudara yang tidak suka akan bilangan lima ini. Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja.

Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan peri-kemanusiaan saya peras menjadi satu saya namakan socio-nationalisme demokrasi dengan kesejahteraan, saya peras pula menjadi satu saya namakan socio-demokratie. Tinggal lagi ke Tuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga :

1. Sosio-nasionalisme
2. Socio-demokratie
3. Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Kemudian ditawarkan lagi menjadi Eka Sila : “Tetapi barangkali tidak semua saudara-saudara senang kepada Tri-Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia tulen yaitu perkataan gotong-royong Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong-royong yaitu satu buat semua, semua buat satu dan semua buat semua.”⁶⁸

Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga ketua BPUPKI menunjuk dan membentuk Panitia Kecil. Tugas Panitia Kecil itu adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara itu.⁶⁹

Dalam keanggotaan Panitia Kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara.

Sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan.

Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 22 Juni 1945)

⁶⁸ Ibid., h. 41-42

⁶⁹ Wahyu Widodo, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta:Cv.Andi Offset,2015), h.62

telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan itu dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Charter).

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentang Piagam Jakarta ini, Soekarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan bahwa “Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan.⁷⁰

Pengakuan adanya Piagam Jakarta, berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945, tidak hanya mengenai pasal 29 UUD 1945, yang mana pasal tersebut menjadi dasar bagi kehidupan hukum

⁷⁰*Ibid.*, h. 62-63

dibidang keagamaan, dan atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan, atau peraturan pemerintah lainnya bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan atau yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan tidak mengurangi ketentuan pasal 29 UUD 1945 bagi pemeluk agama lain.⁷¹ Saifuddin Zuhri menegaskan, bahwa Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam yang menjadi pengobat dan terbukanya revolusi nasional dan peranan ketatanegaraan kita yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya, dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan negara dan kehidupan ideologi seluruh bangsa.⁷²

Tahir Azhary menyimpulkan dual hal dicantumkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, yaitu; pertama, Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945. Kata dasar menjiwai adalah jiwa berarti spirit atau ruh, artinya apabila UUD 1945 diumpamakan jasmani manusia, maka yang menjadi roh bagi UUD 1945 adalah kekuatan dinamika bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, UUD 1945 tidak mungkin eksis tanpa Piagam Jakarta. Apabila diumpamakan sebagai wujud manusia, maka UUD

⁷¹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 juni 1945 Sebuah Konsesus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta:GEMA INSANI PRESS,1997), h.130

⁷² *Ibid*, h 135

1945 tanpa Piagam Jakarta ibarat manusia yang sudah ditinggalkan oleh ruhnyanya. Karna itu, sangat tepat sekali apabila Presiden RI atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang melalui Dekrit 5 Juli 1959 menuangkan pertimbangan tersebut sebagai salah satu konsiderannya pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kedua dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebutkan bahwa Piagam Jakarta adalah satu rangkaian dengan UUD 1945. Ini berarti bahwa Piagam Jakarta merupakan suatu bagian yang integral dengan UUD 1945. Piagam Jakarta tidak mungkin dipisahkan dari rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Konsekuensi logis dari konsiderasi ini, bahwa secara konstitusional Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tidak mungkin dimatikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan Piagam Jakarta dengan UUD 1945 sangat erat sekali sebagaimana ditegaskan dalam konsiderasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.⁷³

Tahir Azhary menjelaskan, bahwa sesungguhnya Piagam Jakarta merupakan embrio bagi pembukaan UUD 1945, tanpa Piagam Jakarta tidak mungkin lahir pembukaan UUD 1945. Karena itu, jika berbicara UUD 1945, maka Piagam Jakarta jangan dilupakan. Bahkan ditegaskan, “Tanpa Piagam Jakarta UUD 1945 mati atau bangkai”. Pernyataan terakhir ini menarik, karena berbagai pernyataan pemimpin Islam yang terlibat langsung dalam proses pengesahan dan penetapan UUD

⁷³ Salma Magalatung, *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan Politik Hukum Indonesia (Prespektif Hukum Islam)* (Jakarta: Fokus Gramedia, 2012), h.163.

mengatakan, bahwa kalimat “ Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pengganti kalimat “ Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang sesungguhnya bermakna Tauhid.⁷⁴

Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara tersebut. Namun demikian sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting.

Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti ini. Sore hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima Nisijima (Pembantu Laksamana Mayda/ Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka.

Pesan tersebut kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur dibawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang di kuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) : “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Sikap Moh. Hatta saat itu ia menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia

⁷⁴ *Ibid.*

merdeka yang baru saja dicapai. Jika hal akan kembali dikuasai oleh kaum Klonial Belanda. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari tanggal 18 Agustus 1945.

Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahdi Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁵

2. Sejarah Lahirnya Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Ketika Jepang semakin terpuruk gerakan militernya, Jepang sadar bahwa disuatu saat kelak, mereka akan kehilangan kekuasaannya di Nusantara. Oleh sebab ini, pada tanggal 1 Maret 1945, Pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ *Dokuritsu Tsyunbi Cosakai*). Dan pembentukan BPUPKi ini merupakan langkah kongkret pertama yang dilakukan Jepang dalam merespon cita-cita

⁷⁵ *Ibid.*, h.64

kemerdekaan Indonesia. Dan pada bulan Mei 1945 BPUPKI bersidang pertama kalinya di gedung *Volksraad*, Jakarta.⁷⁶

Sementara itu, situasi perang semakin tidak menguntungkan Jepang, dan Negara ini hanya menunggu waktu untuk bertekuk lutut. Karena itu, pada tanggal 7 Juli 1946, kabinet Jepang menyetujui rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu yang singkat. Menurut pemerintah Jepang, harus ada sebuah badan yang mempersiapkan dan mengumumkan kemerdekaan tersebut.

Prakarsa pembentukan badan diserahkan kepada bangsa Indonesia sendiri. Dan pada tanggal 21 Juli 1945, Kabinet Jepang menyetujui semua rencana yang disusun BPUPKI. Jendral Sushiro Itagaki menyelenggarakan sebuah konferensi pres di Tokyo yang dihadiri kepala-kepala staff pasukan Jepang dan mengemukakan rencana kemerdekaan Indonesia “seluruh Indonesia” ditetapkan dalam tahun 1946.⁷⁷

Tanggal 5 Agustus 1945 BPUPKI merampungkan tugas menyusun undang-undang dasar, dan pada tanggal 6 Agustus tahun yang sama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia lengkap dengan semua daerah ini direnvanakan bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi sebagai panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara bernarkas di Saigon menugaskan para penguasa Jepang di Jawa

⁷⁶ Kamaruddin, *Dimensi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”* dalam Perespektif HAM Islam, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No I, 2003, h. 165

⁷⁷ Adnan Amal dan Irza Arnyta Djafar, *Maluku Utara Perjalanan Sejarah 1800-1950* (Ternante : Universitas Khairun, cet ke-I, 2003), h. 156

untuk membentuk sebuah panitia kemerdekaan Indonesia. Tetapi instruksi ini terlambat karena PPKI telah dibentuk oleh pemimpin Indonesia.⁷⁸

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengundang tiga pimpinan bangsa Indonesia Soekarno, Hatta dan Rajiman ke markas besar di dallat. undangan tersebut dimaksudkan untuk membahas keputusan Tokyo tentang kemerdekaan seluruh Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945, jam 12.00 waktu Tokyo, Kaisar Tenno Heika mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu. Sejak pengumuman ini, secara yuridis formal, kekuasaan Jepang atas Indonesia telah berakhir, dan komando Asia Timur pasukan Sekutu pimpinan Mountbatten akan mengambil alihnya. Sejak pengumuman itu pula, semua aktivitas dan prakarsa Jepang untuk memerdekakan Indonesia ikut terhenti secara total. Dengan demikian antara tanggal 15-17 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan.⁷⁹

Sementara itu, kelompok pemuda yang dimotori oleh Chaerul saleh, Anwar, Harsono, Cokroaminoto, dan lainnya, abarua saja menyelesaikan kongres pemuda di Jakarta. Mereka sangat anti Jepang serta berupaya memaksa Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak mengendaki pengaitan kemerdekaan Indonesia kepada Jepang, ketika kelompok pemuda itu mendesak, bung Hatta mengemukakan kepada mereka :

⁷⁸ *Ibid.*, h. 158

⁷⁹ *Ibid.*, h. 159

“Bahwa soal kemerdekaan Indonesia, apakah ia datang dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesiasendiri, tidaklah menjadi soal, karena Jepang tokh sudah berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di indonesia. Karena itu, untuk memproklamsikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisir.”⁸⁰

Berdasarkan desakan dari kaum muda serta kekosongan kekuasaan karena proses perpindahan kekuasaan Indonesia dari Jepang kepada komando Asia Timur itu, Dwi Tunggal Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamsikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam sidang BPUPKI yang dilanjutkan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), kemudian lebih mengerucut menjadi Panitia sembilan membahas dasar negara, kelompok Islamis menginginkan agar negara Indonesia berdasar atas “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun kelompok nasional sekelur menolak keinginan tersebut dengan alasan adanya keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur atas rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.⁸¹

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamsikan Soekarno-Hatta menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula wakil golongan islamm, keberatan dengan usul penghapusan itu. Namun setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnay mereka menyetujui rumusan tujuh kata yang dikenal

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, h. 160

dengan Piagam Jakarta tersebut diganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁸²

B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Ideologi adalah keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan. Dengan demikian ideologi mengandung orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial.⁸³

Fungsi ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti ada dua yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar dalam pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.⁸⁴

Ada tiga dimensi sifat ideologi yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas :

⁸² Kamaruddin, *Dimensi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”* dalam *Perespektif HAM Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No I, 2003, h. 168

⁸³ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.8.

⁸⁴ Wahyu Widodo, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015), h. 140-141.

1. Dimensi Realitas : nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan meghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama, Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
2. Dimensi Idealisme : ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
3. Dimensi Flesksibilitas : ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokrati. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara dan memperkuat relevansinnya dari masa kemasa.

1) Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan mewujudkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup da beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- c. Pengalaman sejarah politik masa lampau
- d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam ragka mencapai tujuan nasional.

- 2) Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu :
- a. Stabilitas nasional yang dinamis.
 - b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
 - c. Mencegah berkembangnya paham liberalisme.
 - d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat.
 - e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

1. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Dari gambaran di atas menunjukkan terdapat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara juga merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai saran pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.⁸⁵

Dengan demikian, Pancasila telah dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan bangsa sebagai dasar negara serta pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Republik Indonesia termasuk jalur

⁸⁵ *Ibid.*, h. 141-142

hukum negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung dasar negara, ideologi bangsa, pedoman bangsa, cita-cita bangsa, dan jiwa bangsa karena itulah Pancasila dijadikan pilihan bangsa Indonesia karena Pancasila adalah jiwa dari Indonesia.

2. Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945 adalah mengandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan kebudayaan.⁸⁶

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maksudnya sumber nilai dalam bertindak laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dari harta kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri.

⁸⁶ Burhannudin, *Filsafat Pancasila* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 47

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh Negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari undang-undang nilai sehingga Pancasila merupakan asa kerohanian bagi tata tertib hukum Indonesia dan meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.⁸⁷

C. Inti Muatan Isi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Ketuhanan dalam Negara Indonesia

Pernyataan bangsa Indonesia ber-Tuhan dikemukakan oleh Mohammad Yamin dalam persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengemukakan bahwa negara yang hendak dibentuk adalah negara yang berdasarkan kebangsaan dan ketuhanan. Ia membedakan negara kebangsaan berKetuhanan dalam Indonesia baru dengan Indonesia lama pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Negara Sriwijaya didirikan berdasar atas dasar *kedatuan* yang selaras dengan kepercayaan “magis” dan agama Budha Mahayana. Negara Majapahit disusun atas faham *keperabuan* dan bersandar kepada paduan antara agama Syiwa dan Budha, menjadi Tantrayana. Negara Indonesia baru berbeda dengan kedua negara tersebut.⁸⁸

Yamin menunjukkan bahwa susunan sosial politik itu sangat berkaitan dengan kepercayaan agama, pemikiran yang berkembang dan situasi dunia. Ia tidak menyebut Islam sebagai dasar penyusunan negara yang akan

⁸⁷ *Ibid.*, h. 143

⁸⁸ Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila* (Yogyakarta: KEPEL PRESS:2007), h. 13

dibentuk , walaupun Islam sebagai agama mayoritas penduduk. Yamin ingin memberikan argumen bahwa sistem kesatuan dan keberabuan tidak sesuai bagi negara yang akan dibentuk.

Sistem kesatuan dan keberabuan merupakan sistem yang sesuai dengan kepercayaan masa lalu, yang melihat susuna masyarakat sebagai hirarki seperti terlihat dalam sistem kasta. Kekuasaan dipegang oleh kasta tertentu atau keturunan tertentu. Selain itu seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pada sistem kekuasaan tradisional berdasar pada legitimasi religius, sedangkan sistem yang berkembang dalam dunia internasional adalah legitimasi demokratis. Legitimasi demokratis juga sesuai dengan kepercayaan agama masyarakat Indonesia yaitu agama Islam setelah mengalami reformasi. Islam yang telah mengalami reformasi seperti telah disebutkan sebelumnya, menjadi penggerak nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan, karna islam tidak sekedar difahami sebagai ritual namun mencakup penataan sosial politik.⁸⁹

Uraian di atas menunjukkan bahwa dasar terbentuknya susunan sosial-politik tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan keagamaan atau peahaman tentang Ketuhanan. Oleh karna itu, Pancasila sebagi dasar negara berdasar atas pemahaman Ketuhanan yang telah mengalami reformasi.

Pandangan Soekarno menunjukkan kesamaan pandangan denga Yamin. Dalam pidatonya yang dikenal dengan “pidato lahirya Pancasila” tanggal 1 Juni 1945, mengemukakan :

⁸⁹*Ibid.*, h.114

“juga di dalam urusan kepala Negara, saya terus terang saya tidak akan memilih monarkhi. Apa sebab ? oleh karena monarkhi “voor onderstelt erfelijk heid”, turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya seorang Islam, saya menghendaki mufakat, saya minta supaya tiap-tiap Kepala Negara pun dipilih Tidakkah Agama Islam menyatakan bahwa Kepala-kepala Negara, baik khalif, maupun Amirul Mu'minin, harus dipilih oleh rakyat?”

Jelaslah disini bahwa sistem kenegaraan, baik dalam kepemimpinan negara maupun sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia bukan sekedar meniru sistem Barat. Sistem demokrasi dan tata cara pemilihan kepala negara menurut kedua tokoh tersebut bersumber pada kepercayaan keagamaan yang dianut oleh penduduk Indonesia.⁹⁰

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tersebut diatas tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan mengikutnya.⁹¹

Sila pertama Pancasila berbunyi : “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini mengandung dua pengertian pokok yaitu pengertian tentang Ketuhanan dan tentang Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yakni Allah, Dzat Yang Maha Esa, Pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan disebut juga Sebab Yang Pertama yang tidak disebabkan lagi.

⁹⁰ *Ibid.*, h.115

⁹¹ Kansil, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta:Pradnya Paramita:2001), h.56

Alam beserta kekayaannya seperti sumber-sumber minyak bumi, batubara, besi, air, udara, dan lain-lainnya merupakan ciptaan-Nya. Demikian pula makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia, semuanya dari Tuhan dan nantinya kembali kepada Tuhan.

Yang Maha Esa berarti Yang Maha Satu atau Yang Maha Tunggal dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia esa dalam dzat-Nya, esa dalam sifat-Nya, dan esa dalam perbuatan-Nya. Oleh karena kekhususan-Nya itu, maka tidak ada yang menyamai-Nya. Dia Maha Sempurna.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Kepercayaan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat aktif. Artinya kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.⁹²

2. Kebebasan Beragama

Pidato Soekarno 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI menegaskan bawa prinsip Ketuhanan selain bangsa Indonesia ber-Tuhan dan setiap orang hendaknya ber-Tuhan, juga hendaknya negara Indonesia menjadi negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa.

⁹² *Ibid*, h. 57

Soekarno juga menegaskan setiap rakyat harus menghormati pemeluk agama lain dan juga menghormati agama lain.⁹³

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan.

3. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya sebagai Rumusan Kompromi

Pada masa persidangan BPUPKI dua kelompok yang berbeda haluan disebut sebagai “kelompok Islam” yaitu mereka yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, serta “kelompok Nasionalis” yang menghendaki negara yang mengatasi semua paham peseorangan maupun kelompok (negara integralistik).

Nasionalis Islam menghendaki Islam sebagai agama mayoritas, dijadikan sebagai dasar negara dengan tuntutan optimal :

1. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam”
2. Kepala negara adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam
3. Islam sebagai agama (resmi) negara.

⁹³ *Ibid.*, h.116

Kompromi terjadi dengan dirumuskannya Piagam Jakarta yang didalamnya terdapat rumusan sila pertama berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁹⁴

Berdasarkan laporan BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Sila pertama dalam Piagam Jakarta itu oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dipertanyakan maknanya, karena menurutnya tidak ada artinya dan janggal. Ia mengusulkan kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret. Ia juga mengatakan bahwa rumusan itu akan menimbulkan pengecualia yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam undang-undang dasar. Pertanyaan dari Hadikoesoemo tersebut tidak pernah terjawab. Rajiman sebagai ketua BPUPKI dan Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil Perancang UUD hanya menekankan fungsi dari rumusan itu sebagai kompromi antara kelompok Islam dengan nasionalis.⁹⁵

Berdasarkan kutipan diatas dapatlah disimpulkan bahwa tafsir atau penjabaran Pancasila haruslah tidak bertentangan dengan sumber dari ajaran Islam sebagai induk dari segala sumber kebudayaan Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Perbedaan pandangan antara Nasionalis Islam dengan Nasionalis sekuler terletak pada pandangannya tentang sumber kebudayaan Indonesia. Kelompok pertama memandang Islam sebagai sumber kebudayaan Indonesia sedangkan kelompok kedua memandang

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*, h.117

keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kebudayaan yang harus mengisi muatan Pancasila.

4. Rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” Sebagai Usaha Mewujudkan Persatuan yang Bulat

Hasil kompromi antara Nasionalisme Islam dengan Nasionalisme Sekuler melalui Piagam Jakarta mendapat tanggapan dari peserta sidang. Soekarno melihat terdapatnya rasa curiga umat Islam terhadap kenetralan negara terhadap agama. Yang dimaksud netral dalam agama adalah jika negara Indonesia tidak berdasarkan pada agama (Islam), seperti yang dikehendaki kelompok Nasionalisme Sekuler. Hal ini memberikan gambaran tentang alasan masih kuatnya keinginan untuk menetapkan Islam sebagai dasar Negara.

Dari sisi lain, Abdul Kahar Moezaki dan Hadikusumo menginginkan sikap tegas, jika ideologi Islam ditolak, maka tidak perlu adanya kompromi. Bagi Hadikusumo, sikap terang-terangan lebih baik dari pada kompromi yang tidak dimengerti dan tidak boleh diterangkan maknanya. Ia tidak menyetujui kata-kata Islam hanya dipakai ujung-ujungnya saja (sebagai label), yang menimbulkan kesan tidak baik bagi umat Islam. Oleh karena itu kompromi itu, oleh Soekarno memberikan solusi dengan memasukkan pernyataan “presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam” di dalam Undang-undang Dasar, walaupun mungkin diterima dengan berat hati oleh para anggota yang beragama lain. Selain itu pasal 28 ayat 1 dalam rancangan UUD diputuskan berbunyi “Negara

berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁹⁶

Pada persidangan pertama PPKI tanga 18 agustus 1945, berdasar atas usulan yang masuk kepada *Zumokyoku* (kantor administrasi) maka pernyataan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pembukaan maupun Pasal 29 ayat 1 (semula Pasal 28 ayat 1) diganti denga “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu pernyataan pasal 6 ayat 1 berbunyi “presiden ialah orang Indoesia asli”, pernyataan “yang beragama Islam” dicoret. Dapun alesan yang dikemukakan oleh wakil ketua PPKI Mohmmad Hatta oleh karea hasrat kita semua ialah menyataka bangsa Indonesia seluruhnya, supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka psal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari UUD.⁹⁷

Soekarno dalam pidato di Surabaya tanggal 24 September 1955 menyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan segenap rakyat. Maka menurutnya, negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, sesuatu golongan adat-istiadat, akan tetapi milik kita semua.⁹⁸

Nilai sila Keuhanan Yang Maha Esa menjiwai kepribadian manusia Indonesia dalam wujud iman (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikn atak da identitas religius bagi

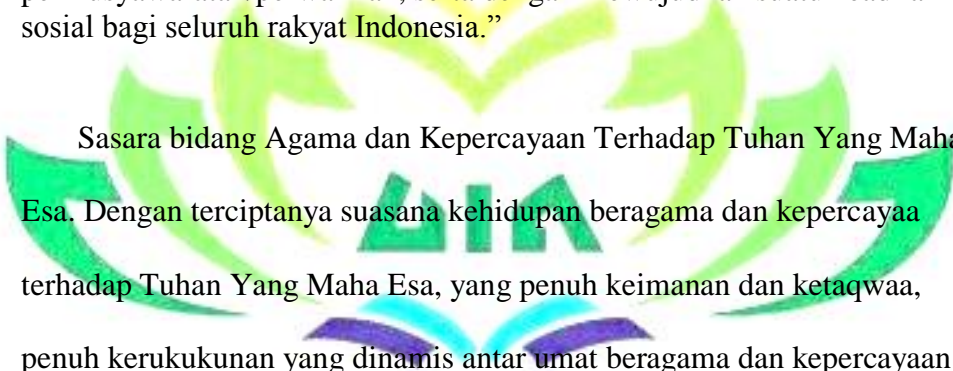
⁹⁶*Ibid.*, h.119-120

⁹⁷*Ibid.*, h.121

⁹⁸*Ibid.*,

masyarakat dan budaya Indonesia. Watak dan identitas ini dilembagakan dan dilestarikan dalam tatana hidup kebangsaan dan kenegaran kita, dengan menjadikan daar negara Pancasila dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kenengaraan, sebagai termaktub dalam pembukaan UUD 1945:⁹⁹

“atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongka oleh keiinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka.... negara Republik Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.negara Republik Indonesia yang berkedaulata rakyat kepda: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



Sasara bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwa, penuh kerukukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spritual, moral, dan etik bagi pembangun nasional, yang terciptanya dalam suasana kehidupan yang harmonis, erta dalam kukuhnya persatuan dan kesatua bagsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.¹⁰⁰

⁹⁹ Darji Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Malang : Laboraturium PANCASILA IKIP MALANG), 1994, h. 194

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 195.

D. Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila

Kesadaran Kehendak tentang rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ada sesuatu diluar manusia, yang menciptakan manusia dan segala isi alam semesta dan sekaligus memelihara dan mengatur ciptaan-Nya.¹⁰¹

Penerapannya adalah kehidupan beragama bagi manusia dan masyarakat. Pengaturannya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ajaran dan kepercayaan masing-masing. Lebih lanjut rasa akan keagamaan/keimanan ini membuahkan kerukunan umat beragama, toleransi keagamaan di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan umat beragama mewujudkan kerukunan intern umat beragama, antara umat beragama dan antara umat beragama dan pemerintah. Sedangkan toleransi di dalam masyarakat bukan mencampuri urusan kepercayaan sesuatu agama.¹⁰²

Bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara Indonesia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan demikian Pancasila memuliakan agama. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan agama dan memang tidak perlu dipertentangkan. Keduanya saling melengkapi, karena sila pertama dilatarbelakangi oleh suasana religius keagamaan.¹⁰³

Kita menyadari bahwa manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala perbuatan tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak akan berhasil. Manusia merencanakannya, Tuhan yang

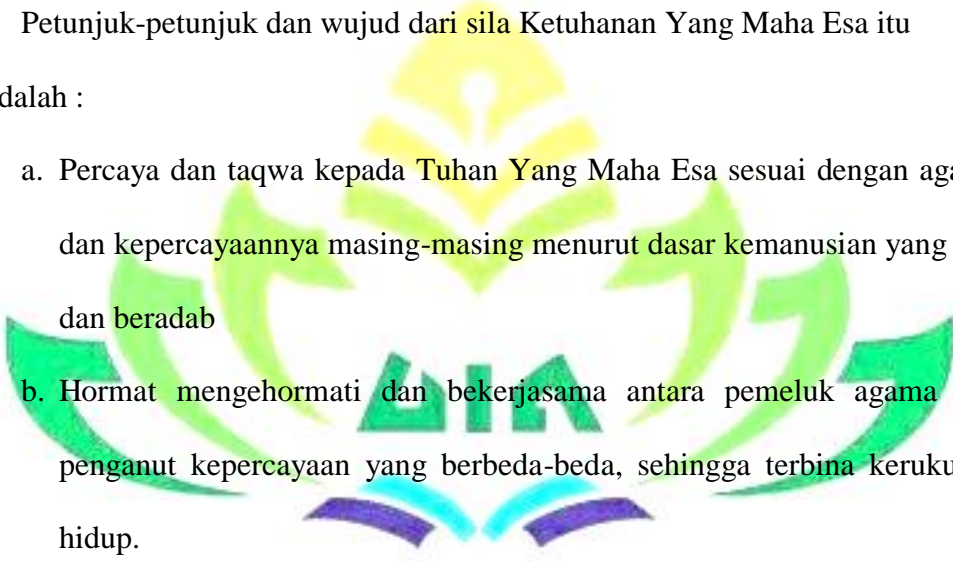
¹⁰¹ Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), h. 14

¹⁰² *Ibid.*, h. 15

¹⁰³ *Ibid.*, h. 17

menentukan, sila pertama merupakan sila inti yang membimbing dan menjiwai, serta menyinari sila-sila lain, sila kedua dan selanjutnya. Sila pertama merupakan dasar yang memimpin cita-cita negara, cita-cita masyarakat, manusia pribadi yang memberikan jiwa dan semangat pada penyelenggara segala kegiatan yang benar, baik dan adil. Pernyataan ini tidak berarti bahwa negara kita adalah negara agama dan bukan pula negara tanpa agama.

Petunjuk-petunjuk dan wujud dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah :

- 
- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
 - b. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbinanya kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.¹⁰⁴

Penciptaan kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, dalam kenyataannya, tidak selalu berjalan mulus seperti yang dicita-citakan. Ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang muncul baik dari campur tangan pemerintah maupun

¹⁰⁴Kansil, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta:Pradnya Paramita:2001), h.58

dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan karena penghayatan terhadap Pancasila, khususnya sila Ketuhanan, tidak dapat dipahami dan dihayati secara mendalam dan menyeluruh.

Akibatnya muncul ideologi-ideologi atau paham-paham yang berbasiskan ajaran agama tertentu. Sehingga seakan-akan bahwa sila kesatu dari Pancasila itu hanya dimiliki oleh salah satu agama tertentu saja. Dengan kata lain bahwa toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari dan diwujudkan. Tentu saja karena adanya golongan-golongan tertentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaannya atau hanya ajaran agamanya sajalah yang paling baik dan benar. Pandangan atau paham yang sempit mengenai pemahaman terhadap agama dan kepercayaan yang seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Konflik antar kelompok agama terkadang juga dapat dipicu karena kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Agama). Seharusnya, Departemen Agama adalah lembaga yang bersifat netral, yang membawahi seluruh unsur-unsur agama yang ada atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan memegang teguh nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Jangan malah mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan ataupun menguntungkan agama-agama tertentu, yang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan antar umat beragama yang tentu saja berbeda agama dan kepercayaannya.

Tidak semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Salah satunya yakni PKI (Partai Komunis Indonesia). Alergi terhadap apa saja yang berbau komunis sepertinya selalu dibawa ke ranah bahwa orang-orang PKI atau Komunis adalah orang-orang yang tidak beragama dan melarang orang lain untuk percaya kepada Tuhan, karena pada era "perang ideologi" komunisme melawan liberalisme, dunia Barat sebagai pencetus liberalisme sepertinya kehilangan "akal sehat" untuk membendung ideologi komunisme. Maka dikobarkan semangat anti komunisme yang dianggap sebagai atheis dan anti agama. Negara-negara Komunis memang sangat keras terhadap penganut Kristen waktu itu, karena kaum agamawan atau penganut Kristen dianggap telah meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara dari banyak negara, sehingga lebih mencintai Tuhan-nya daripada negaranya. Maka lahir istilah di ajaran komunisme, bahwa "agama adalah candu bagi masyarakat".¹⁰⁵

Sebagai bangsa yang dikenal religius, bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar keagamaan yang sangat kuat sejak dulu, sehingga ajaran komunis "agama adalah candu bagi masyarakat" tentu saja bentrok dengan sikap hati mayoritas rakyat Indonesia. Demikian pula ketika penguasa Orde Baru berusaha memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologis dari organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang dibentuk oleh lembaga-lembaga atau partai politik berbasis keagamaan, banyak pula tokoh agamawan waktu itu yang menolak sehingga melahirkan pro-kontra.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Mencintai negara ala ideologi "Pancasila" maupun "Komunisme" bila dipelajari secara saksama sebenarnya sangat mirip, karena meletakkan dasar mencintai negara sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak boleh di nomor duakan. Bagi yang sudah pernah bepergian ke Vietnam Dan RRT, maka dapat melihat betapa negara tersebut persis sama dengan negara Indonesia ketika diperintah oleh penguasa ORBA.

Di era ORBA dulu, ketika seorang tokoh agama atau lembaga kemasyarakatan dan partai politik yang berbasis keagamaan mulai menunjukkan "berseberangan" dengan penguasa ORBA, maka jangan heran kalau waktu itu mereka dicituk atau dianggap sebagai pengganggu stabilitas politik & keamanan negara. Di negara komunis juga demikian terjadi, mereka akan diawasi oleh polisi yang menyamar maupun yang terang-terangan mendengarkan khotbah para tokoh agama yang mengajarkan di mesjid maupun di gereja-gereja. Bila sudah mulai "berseberangan" maka mereka juga akan dicituk dan dipenjara sebagai pengganggu stabilitas politik & keamanan negara.

Perbedaan mendasar negara Pancasila dengan negara Komunis hanya kepada pencantuman "agama" yang dianut oleh para penguasa & penyelenggara negaranya. Negara berdasar Pancasila mencantumkan "agama" yang dianutnya, sedangkan di negara komunis sama sekali tidak ada pencantuman "agama" atau keyakinan yang dianutnya. Secara politik dan mempertahankan kekuasaan semuanya tak lebih dan tak kurang semuanya

mirip. Negara penganut paham komunis memang memisahkan kekuasaan negara dengan agama.

Karena berjalannya waktu, di negara-negara komunis karena tidak mengajarkan pengajaran agama atau keyakinan kepada setiap generasinya, maka jangan heran kalau dijumpai rakyat mereka dikenal sebagai penganut "atheis" alias tidak mengenal Tuhan sebagai pelindung & penguasa dalam kehidupan pribadinya, semua yang melindungi dan menguasai kehidupan mereka adalah negara.

Departemen Agama tidak boleh mengurus atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan suatu agama. Namun, hanya bertindak sebagai pengontrol dan penjamin. Aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya sebatas untuk menjaga ketertiban dan keamanan antar umat beragama, demi tercapainya kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.¹⁰⁶

Hakikat pembangunan bidang agama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian integral dari tujuan dan upaya pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (MIS) dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya; seluruh nusantara bagi semua suku, semua warga Indonesia.

Sasaran pembangunan jangka panjang bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut :

¹⁰⁶ Amidy, *Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, AMIKOM: 2011), h. 40

a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia Harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya, sert memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang sehingga sanggup dan mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

b. Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesucilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan ini sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari manusia Indonesia sebagai pendukungnya.¹⁰⁷

Hakikat Pembangunan nasional, kekuasaan pembangunan MIS sebagai subyek berkualitas yang menentukan tegak-lestarinya bangsa-negara, kemerdekaan-kedaulatan bangsa, tepusat dan bertumpu atas kualitas MIS sebagai sumber daya utama. Hakikat kualitas MIS terutama kualitas iman dan ketakwaannya sebagai esensi kesadaran moral-spiritual (keagamaan) yang menjadi pedoman dan kendali pribadi manusia dan kewajiban hidup pribadi, sosial-budaya nasional dan internasional (kemanusiaan).¹⁰⁸

¹⁰⁷Darji Darmodiharjo, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Malang : Laboratorium PANCASILA IKIP MALANG), 1994, h. 196

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 197

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa negara mengakui adanya Tuhan. Tuhan merupakan pencipta seluruh alam semesta ini. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu baginya Esa dalam zatNya, dalam sifatNya maupun dalam perbuatanNya. Tuhan sendirilah yang maha mengetahui dan tiada yang sanggup menandingi keagungannya.

Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan diantara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainNya adalah terbatas.

Nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai kepribadian manusia Indonesia dalam wujud iman (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bahkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan watak dan identitas religius bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Watak dan identitas ini dilembagakan dan dilestarikan dalam tatanan hidup kebangsaan dan kenegaraan kita, dengan menjadikan dasar negara Pancasila dan asas Ketuhan Yang Maha Esa sebagai dasar kenegaraan.

1. Substansi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Persatuan

Pancasila menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke tanpa membedakan ras, suku, etnis, dan agama. Adanya perubahan dalam poin-poin Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal lahirnya UUD 1945 merupakan salah satu usaha pendiri bangsa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Poin-poin yang menyebutkan suatu kaum itu di hapus menjadi lebih bersifat umum.

Selain itu, Pancasila dan UUD memberi kebebasan bagi seluruh warga negara dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Dan menghendaki adanya saling toleransi antar umat beragama agar konflik-konflik yang berbau Sara tidak terjadi di Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai idiologi negara yang juga dimuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 memiliki fungsi dan peranan yang sangat jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (*bhineka Tunggal Ika*) sebagaimana tertuang dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesi yang diperkuat dengan pedoman pengamalan Pancasila. Selain itu Pancasila juga memuat tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang menjadi salah satu kunci persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengamalan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kebebasan Beragama

Setiap individu bangsa Indonesia mempunyai hak kemerdekaan memilih agama dan kepercayaan yang diyakininya. Tidak ada paksaan dari siapapun untuk memeluk suatu agama, baik itu negara, organisasi/kelompok atau bahkan orangtua.

Tiap pemeluk agama mempunyai hak dan kewajiban warga negara, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Sehingga setia warga negara apapun agamanya, apabila dikehendaki rakyat dapat duduk dalam pemerintahan dan bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Adanya jaminan kebebasan yang otonom bagi setiap individu untuk memilih agamanya, dan bebas untuk menentukan dan menetapkan agama yang ia yakini. Serta adanya kebebasan otonom pula bagi tiap kelompok agama dengan kepastian dan perlindungan hukum, untuk pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamanya masing-masing.

Kemerdekaan beragama dapat dimaknai sebagai kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai syariat atau aturan agama dan kepercayaan yang diyakini setiap orang. Termasuk di dalamnya melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan agamanya masing-masing seperti merayakan hari besar agama, mengadakan ceramah agama dan sebagainya.

Berdasarkan essensi nilai dalam sasaran ini, dijabarkan sebagai sasaran pokok sebagai berikut :

1. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan pancasila.

2. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , kualitas kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus makin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Fiqih Siyasah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa disebut dengan Rabbaniyah. Adapun pengertian rabbaniyah sendiri ialah Rabb adalah perkataan arab yang dinisbahkan kepada Allah. Perkataan manusia rabbani, contohnya, membawa maksud, manusia yang berpengetahuan tentang Allah, berpegang teguh dan beramal dengan ajaran Allah SWT.

Sebagaimana Firman Allah QS : Al-Imran : 79

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.

Rabbaniyyah membawa maksud ketuhanan. Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan adalah datang dari Allah swt. Islam itu sangat sempurna dan kesempurnaan itu merupakan bukti ajaran ini adalah datang dari tuhan dan tiada sebarang campur tangan makhluk dalam pembuatannya.

Setiap satu aturan yang diperkenalkan dalam Islam adalah aturan yang selayaknya dikatakan adil kerana ia dibuat tanpa didorong oleh kejahilan, hawa nafsu dan tidak datang dari pemikiran yang terbatas. Semua makhluk yang mendiami alam ini adalah milik mutlak Allah swt yang menguasai dan memiliki alam ini. Menjadi satu kemestian untuk semua makhluk tunduk dan patuh kepada pencipta yang juga pemerintah alam, Allah swt. Semua makhluk bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai hamba Allah swt. Setiap aturan

dan undang-undang yang terkandung dalam ajaran Islam adalah datang dari Allah swt dan tiadalah manusia berhak untuk mempertikaikannya.

Dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Fiqih Siyasah adalah :

1. Persaudaraan

dalam tren Islam, persaudaraan dikenal dengan kata *Ukhuwwah* yang terdiri dari tiga macam yaitu: pertama, *Ukhuwwah Basyariyyah* (persaudaraan sesama manusia). Kedua, *Ukhuwwah Islamiyah* (Persaudaraan sesama muslim). Ketiga, *Ukhuwwah Wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan).

2. Persamaan

Memang dalam prespektif sejarah, nabi Muhammad telah membawa perubahan yang demikian besar dalam kehidupan kemasyarakatan dalam persoalan stratifikasi sosial. Masyarakat tidak dibedakan berdasarkan status dan kelas sosial, akan tetapi dianggap sama sebagai warga masyarakat.

3. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud disini adalah, setiap umat bebas melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan dan haknya, dengan syarat tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain.

4. Toleransi

Dalam Islam, toleransi sangat dijunjung tinggi meskipun kita senantiasa dianjurkan untuk mengajak sesama pada kebenaran dan kebaikan akan tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan.

5. Pri-Keadilan

Dapat diartikan sebagai menempatkan suatu pada tempatnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian tidak akan ada penetapan hukum yang mempertimbangkan status dan kelas sosial salah satu umat, semua warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

C. Pendapat Peneliti

Secara tataran teori yang penulis teliti dan yang dapat di pahami serta yang dapat di analisa, adalah bahwasannya nilai Ketuhan Yang Maha Esa baik di telaah dalam UUD 1945 atau Pancasila dan fiqh siyasah, ialah nilai Ketuhan Yang Maha Esa tidak bertentangan dengan agama Islam maupun agama non Islam. Sebab nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang mampu mempersatukan dan memperkuat suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia.

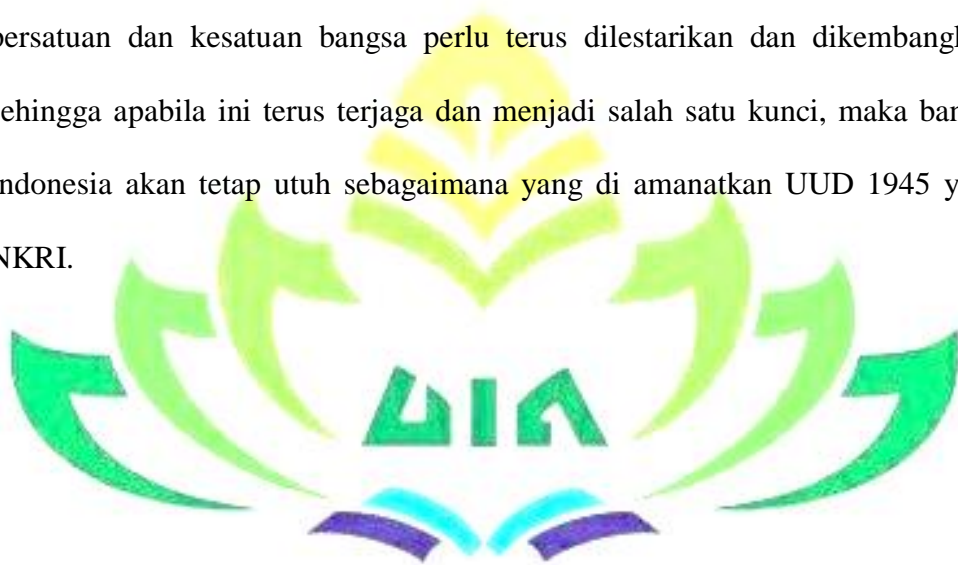
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dimiliki oleh umat Islam saja, melainkan umat non Islam pun berhak memilikinya dan menanamkan dari nilai-nilai Ketuhan Yang Maha Esa. Karena bangsa Indonesia dengan jelas telah mengatur dalam UUD 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwasanya setiap

warga negara berhak memeluk agamanya dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya itu.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila ini bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak dipimpin oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah representasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan bahwa keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi merupakan urat-urat penting dalam membangun kebangsaan yang adidaya. Nilai dari sila pertama adalah perwujudan penghargaan kepada agama-agama. Tidak ada agama satupun yang menjadi hukum ataupun ideologi Negara. Semua agama telah membuat kesepakatan budaya dan politik bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara. Dengan begitu Indonesia bukanlah negara agama namun Negara Pancasila. Agama dan negara tidak bisa dikatakan sekuler di Indonesia, karena Negara dan agama adalah kesatuan nilai kebangsaan. Tidak pula menjadikan agama tertentu sebagai prinsip kebangsaan. Namun semua agama membangun sebuah dialog kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila. Sebagaimana sila pertama yang mendasarkan akar-akar berketuhanan sebagai prinsip paling dasar kehidupan berbangsa. Dengan demikian maka Indonesia adalah “negara beragama”, bukan Negara agama.

Namun dengan adanya sifat toleransi bukan berarti negara Indonesia membebaskan warga negaranya untuk menganut ideologi komunisme dan tidak percaya pada keberadaan adanya Tuhan.

Dalam teori fiqh siyasah sendiri, suatu dasar-dasar negara bangsa atau idiologi bangsa sendiripun sudah dijelaskan dan di praktekkan dengan mendetail oleh nabi Muhammad SAW. Karena beliau selain menjadi nabi, Muhhamad Saw merupakan tokoh politisi dan negarawan. Idiologi yang digagas oleh Muhammad sendiri adalah dengan mengedepankan nilai-nilai tauhid, perikemanusiaan, persamaan hak, toleransi, dan persaudaraan. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus dilestarikan dan dikembangkan, sehingga apabila ini terus terjaga dan menjadi salah satu kunci, maka bangsa Indonesia akan tetap utuh sebagaimana yang di amanatkan UUD 1945 yaitu NKRI.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu maka pada bab penutup ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

a. Ketuhanan dalam Negara Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Kepercayaan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat aktif. Artinya kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.

b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga Negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga Negara

1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi dilingkungan masing-masing.
2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
3. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Fiqih Siyasah

Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Fiqih Siyasah adalah :

1. Persaudaraan

dalam tren Islam, persaudaraan dikenal dengan kata *Ukhuwwah* yang terdiri dari tiga macam yaitu: *Ukhuwwah Basyariyyah*, *Ukhuwwah Islamiyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah*.

2. Persamaan

Masyarakat tidak dibedakan berdasarkan status dan kelas sosial, akan tetapi dianggap sama sebagai warga masyarakat.

3. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud disini adalah, setiap umat bebas melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan dan haknya, dengan syarat tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain.

4. Toleransi

Dalam Islam, toleransi sangat dijunjung tinggi meskipun kita senantiasa dianjurkan untuk mengajak sesama pada kebenaran dan kebaikan akan tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan.

5. Pri-Keadilan

Dapat diartikan sebagai menempatkan suatu pada tempatnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses perkuliahan mata kuliah fiqh siyasah maupun mata kuliah lainnya lebih ditekankan substansi materinya dan pembelajarannya juga ditingkatkan agar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung mendapatkan ilmu yang berkualitas.

2. Kepada masyarakat umumnya harus lebih pandai mengetahui perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara secara damai.
3. Warga Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, mengormati, menghargai, menjaga, memahami dan melaksanakan segala hal yang termaktub dalam Pancasila khususnya sila pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti Muhammad, Ali, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Jawa Barat : CV Pustaka Setia, 2010.
- Ala Al-Maududi, *Adul Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1993.
- Amal, Adnan Maluku Utara *Perjalanan Sejarah 1800-1950*, Ternante : Universitas Khairun, cetke-I, 2003.
- Amidy, *Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, AMIKOM: 2011
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h.107.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed) Cet 4, Jakrata; Rineka Cipta, 1998.
- Azis Wahab, Abdul Materi Pokok Pendidikan Pancasila 1, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996, Cet ke-5.
- Burhannudin, *Filsafat Pancasila*, Jakarta: PTRineka Cipt, 1996, h. 47
- Daud Busroh, Abu, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001.
- Departemen Agama RI *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur'an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Darmodiharjo, Darji, M. Mardojo, dkk, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1991, Cet ke-10.
- Darmodiharjo, Darji *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Malang : Laboratorium PANCASILA IKIP MALANG, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: YP Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pranadamedia, 2014.

Kansil, *Pancasiladan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Pradnya Paramita: 2001.

Kuntono, Kartini *Pengantar metodologi Riset Social*, Bandung: Alumni, 1989.

Magalatung, Salma, *Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan Politik Hukum Indonesia Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Gramedia, 2012, h.163.

Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Salam, Burhanuddin, *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.

Satriawan, Iwan, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Raja Wali Pers, 2016 h. 42

Saifuddin Anshari, *Endang Piagam Jakarta 22 juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1997, h.130

Sibuea, Hotma P, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila*, Yogyakarta: KEPEL PRESS: 2007.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Wahab, Abdul Azis, *Materi Pokok Pendidikan Pancasila 1*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996, Cet ke-5.

Widodo, Wahyu *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.

Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila da HAM di Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004

Zainal Arifin Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Zuhri,Miftahuddin,*Pancasila* ,Yogyakarta:Liberty,1985.

JURNAL

Firdaus, *Konsep al-Rububiyah (ketuhanan) dalam al-Qur'an*. Vol 3 Nomor 1, Tahun 2015.

Kamaruddin, *DimensiSila “Ketuhanan Yang MahaEsa” dalamPerespektif HAM Islam*, Jurnal Agama danHakAzaziManusiaVol 3, No I, 2003.

Sumarni, *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, dalam Jurnal AL-Adalah Vol.X, No. 4 Juli 2012.

Sumber Internet :

<http://megasholihah33.blogspot.com/2015/07/rabbaniyyah-sumuliyyah-al-wudhuh-al.html>Diaksestanggal 17 September 2018 Pukul 13.28.

